



TIPOLOGI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA WISATA: STUDI KASUS DESA TIMUSU

Typology Of Community Participation In Tourism Village Program: A Case Study Of Timusu Village

S. A. Dwi Rara Atma Aulia^{1*}, Nurdin Nara², Hamsinah Djaing³

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

*Email:

dwiraraatma11@gmail.com

^{2,3}Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Keywords: *Tourism Village; Village Development; Citizen Participation; Participation Typologies*

Kata Kunci: *Desa Wisata; Pembangunan Desa; Partisipasi Warga; Tipologi Partisipasi*

DOI:

<https://doi.org/10.61731/dpmr.v4i2.42171>

Abstract

This study aims to examine the typology of community participation in the tourism village development program in Timusu Village, Liliriaja District, Soppeng Regency. Using a qualitative descriptive approach, this study integrates in-depth interviews, observations, and documentation to explore the role of the community in the tourism village development process. The concept of community participation from Tosun (1999), which includes spontaneous participation, encouraged participation, and forced participation, is used as an analytical framework. The results of the study indicate that community participation in Timusu Village is dominated by encouraged participation, where the community is involved at the direction of the local and village governments. However, spontaneous initiatives from the community are still very limited, indicating the need for a more inclusive empowerment strategy. This study provides important insights into the dynamics of community participation in the context of tourism village development, while highlighting the importance of collaboration between the government, the community, and other stakeholders. The practical implications of these findings can be used to improve the effectiveness of sustainable and community-based tourism village development programs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tipologi partisipasi masyarakat dalam program pengembangan desa wisata di Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengintegrasikan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk mengeksplorasi peran masyarakat dalam proses pembangunan desa wisata. Konsep partisipasi masyarakat dari Tosun (1999), yang mencakup partisipasi

Copyright: © 2024 S. A. Dwi Rara Atma
Aulia, Nurdin Nara, Hamsinah Djaing.
This work is licensed under CC BY-NC
4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

spontan, partisipasi dorongan, dan partisipasi paksaan, digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Timusu didominasi oleh partisipasi dorongan, di mana masyarakat terlibat atas arahan pemerintah daerah maupun desa. Meski demikian, inisiatif spontan dari masyarakat masih sangat terbatas, menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan yang lebih inklusif. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa wisata, sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Implikasi praktis dari temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

PENDAHULUAN

Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu wilayah. Secara etimologis, pariwisata berasal dari kata “travel” dalam bahasa Inggris, yang berarti perjalanan berulang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks kontemporer, pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan terencana yang dilakukan individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, kepuasan, atau pengalaman baru. Lebih dari sekadar aktivitas rekreasi, pariwisata juga menjadi salah satu industri penting dengan kontribusi signifikan terhadap pemasukan devisa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan berbagai sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Di Indonesia, sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu bisnis prioritas nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, tetapi juga berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata serta menciptakan suasana aman, tertib, bersih, dan berkelanjutan. Desa wisata, sebagai salah satu bentuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas, menjadi solusi inovatif untuk menjawab kejenuhan wisatawan terhadap bentuk wisata modern. Seperti yang dijelaskan oleh Andriyani (2017) dalam Frasawi & Citra (2018), wisata berbasis desa menawarkan pengalaman autentik, interaksi sosial dengan masyarakat lokal, serta kesempatan untuk merasakan kehidupan tradisional di lingkungan pedesaan.

Desa Timusu, yang terletak di Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, adalah salah satu contoh daerah yang berpotensi menjadi desa wisata unggulan. Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, Desa Timusu menawarkan daya tarik wisata yang unik. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengembangan desa wisata masih terbatas. Fenomena ini menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi desa wisata, mengingat

keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Dalam konteks Desa Timusu, penting untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat agar strategi pengembangan desa wisata dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya studi ini dilakukan terletak pada upaya mengisi kesenjangan penelitian (research gap) mengenai tipologi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek potensi wisata atau dampak ekonomi pariwisata, tetapi jarang yang secara khusus membahas jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam program pengembangan pariwisata desa. Padahal, pemahaman tentang tipologi partisipasi masyarakat sangat penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya lokal. Dalam penelitian ini, digunakan konsep tipologi partisipasi Tosun (1999), yang membedakan partisipasi menjadi tiga kategori: partisipasi spontan, partisipasi dorongan, dan partisipasi paksaan. Konsep ini memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat Desa Timusu terlibat dalam program pengembangan desa wisata.

Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian “Bagaimana tipologi partisipasi masyarakat, seperti partisipasi spontan, dorongan, dan paksaan, memengaruhi efektivitas pengembangan desa wisata di Desa Timusu, Kabupaten Soppeng? “. Dengan memahami bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk dan berfungsi dalam konteks Desa Timusu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih jauh, studi ini juga menyoroti pentingnya pendekatan bottom-up dalam pembangunan desa wisata untuk memastikan keberlanjutan dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, artikel ini menguraikan latar belakang pentingnya studi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, memberikan analisis mendalam tentang tipologi partisipasi, serta menawarkan wawasan baru yang relevan untuk mendukung keberhasilan program desa wisata di Indonesia. Dengan berfokus pada Desa Timusu sebagai studi kasus, artikel ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pariwisata berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka

Definisi Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, kata partisipasi berasal dari bahasa latin pars, yaitu bagian dan *capere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan sebagai “mengambil bagian” (Sitepu, 2012).

Pidarta (2005) dalam Dwiningrum (2011), menjelaskan bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, keterlibatan ini mencakup emosi, mental dan fisik dengan menggunakan segala

kemampuan yang dimilikinya dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan, mendukung tercapainya tujuan serta mengambil tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Pasaribu dan Simanjuntak (1985) dalam Yulis (2012), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berarti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti dan menyertai pemerintah. Hal ini disebabkan fakta bahwa sampai dewasa ini, pemerintah yang bertanggung jawab sebagai perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan, karena pemerintah membiayai sehingga diharapkan masyarakat ikut serta karena hal ini semata mata untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.

Lebih lanjut Ife (2008) menjelaskan bahwa partisipasi harus mencakup kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kegiatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Lebih lanjut Ife (2008) menjelaskan adanya kondisi yang mendorong masyarakat dalam berpartisipasi yaitu: (1) Orang akan berpartisipasi jika mereka merasa aktivitas atau isi tersebut penting; (2) Orang harus merasa bahwa tindakan mereka akan membuat perubahan; (3) Orang harus merasa bahwa partisipasi mereka dihargai dan diakui; dan (4) Orang harus memiliki akses dan dukungan untuk berpartisipasi.

Tipologi Partisipasi

Tosun (1999) mengembangkan tiga kategori atau tipologi dari partisipasi masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan pariwisata. Kategori tersebut yaitu *spontaneous community participation*, *induced participation* dan *coercive community participation*. Ketiga elemen ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Spontaneous community participation

Partisipasi ini bersifat spontan atau sukarela, muncul dari bawah tanpa dukungan eksternal (Tosun, 1999). Partisipasi ini merupakan bentuk ideal, karena mencerminkan kegiatan yang bersifat sukarela dan alamiah dari masyarakat dalam mengatasi masalah mereka tanpa bantuan pemerintah atau lembaga eksternal lainnya.

2. Induced participation

Partisipasi ini mengarah pada formal, *top down and passive participation*, dimana suara dari masyarakat lokal didorong dan terdengar, akan tetapi tidak didukung oleh kekuatan untuk memastikan bahwa suara masyarakat tersebut terdengar oleh mereka yang memiliki kekuasaan (Tosun, 1999).. Tipe ini banyak digunakan di negara berkembang, dimana masyarakat lokal mendukung keputusan dari pembangunan pariwisata yang dibuat oleh penguasa. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat lokal berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan berbagi benefit dari pariwisata, tetapi masyarakat tidak diikuti sertakan dalam pengambilan Keputusan.

3. Coercive participation

Sebuah kondisi dimana partisipasi masyarakat itu dipaksa dan kurang dalam hal *public support* (Tosun, 1999). Bersifat manipulasi dan dibuat-buat sebagai pengganti partisipasi yang tulus. Motifnya bukanlah memungkinkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan pariwisata, tetapi memungkinkan mereka hanya mempunyai kekuasaan untuk mendidik masyarakat lokal sehingga dapat menghindari ancaman potensial terhadap pembangunan pariwisata.

Meskipun beberapa keputusan mungkindiambil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tuan rumah dengan berkonsultasi dengan pemimpin lokal, motif sebenarnya ialah mengurangi potensi resiko sosial-politik dalam pengembangan pariwisata

Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata menjadi kajian dalam administrasi publik dengan fokus pada pengelolaan sumber daya lokal, partisipasi masyarakat, dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata tersebut (Riady et al., 2024; Gede et al., 2024). Pengembangan desa wisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk melestarikan budaya dan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat setempat dalam proses pengelolaan destinasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat penting, karena dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi yang dikembangkan (Rahmati & Wijaya, 2024). Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, di mana semua pihak dapat merasakan manfaat dari pengembangan tersebut.

Pengembangan desa wisata sering kali dianggap sebagai upaya yang positif tetapi ada pandangan yang berbeda mengenai dampak dan efektivitasnya. Pertama, meskipun tujuan pengembangan desa wisata adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberdayakan masyarakat, sering kali keuntungan ekonomi tidak merata dan hanya menguntungkan segelintir individu atau pengusaha besar, sementara masyarakat lokal tetap terpinggirkan (Yaniza et al., 2024). Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial di antara warga desa. Kedua, meskipun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dianggap penting, sering kali terdapat ketidakcocokan antara kepentingan masing-masing pihak (Fitri et al., 2023). Pemerintah mungkin lebih fokus pada peningkatan pendapatan dan citra daerah, sementara masyarakat lokal mungkin lebih peduli pada pelestarian budaya dan lingkungan mereka (Rincon & Rahmi, 2002). Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan ketegangan dan menghambat kemajuan dalam pengembangan desa wisata.

Selanjutnya, meskipun keterlibatan masyarakat dianggap sebagai kunci keberhasilan, kenyataannya banyak warga yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau dihargai (Liu et al., 2023). Banyak inisiatif pengembangan desa wisata yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan rasa apatis dan skeptisisme terhadap proyek-proyek tersebut (Liu et al.,

2023; Darmanto, et al., 2024). Tantangan dalam menggalang partisipasi warga, seperti kurangnya informasi dan perbedaan kepentingan, sering kali lebih besar daripada yang diperkirakan. Banyak warga yang merasa bahwa mereka tidak memiliki dampak signifikan dalam proyek-proyek tersebut, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi (Ghaderi et al., 2022). Dalam hal ini, pendekatan yang dianggap inklusif bisa jadi tidak lebih dari sekadar formalitas, tanpa adanya perubahan nyata dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat.

Untuk itu penting untuk memetakan tipologi partisipasi masyarakat dalam memahami strategi efektif dalam pengembangan desa wisata (Sulistyowati et al., 2024). Namun masih terdapat kekurangan studi mengenai pemetaan tipologi partisipasi warga dalam pengembangan desa wisata. Pemetaan ini dapat membantu mengidentifikasi tingkat keterlibatan yang diinginkan serta menciptakan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengembangan (Mulyan & Martoni, 2024). Pemetaan ini juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dinamika sosial yang ada, sehingga mereka dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi komunitas lokal. Dengan demikian, pemetaan tipologi partisipasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat setempat.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pandangan mendalam pada fenomena yang diteliti, mengkaji lebih detail kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. data yang dikumpulkan harus akurat yang berupa data primer dan sekunder. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Timusu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan suatu fenomena secara umum mengenai masalah yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Timusu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng.

Dalam Penelitian skripsi ini, penulis menentukan salah satu objek penelitian pada Desa Wisata yang terletak di Desa Timusu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng. Desa Timusu memiliki potensi wilayah di bidang pertanian, perkebunan dan wisata. Wisata yang ada di desa ini merupakan wisata alam dan buatan. Wisata alamnya yaitu Permandian Panas Bucello, wisata buatan yaitu Permandian Cekdam. Selain itu desa ini juga terkenal dengan kulinernya yaitu Sarabba dan juga memiliki wisata budaya yaitu

seperti *mappadendang* dan *maddoja bine*. Selain itu, Kategori Desa wisata di Desa Timusu yaitu rintisan dengan klasifikasi yaitu klasifikasi maju

Penelitian ini mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dengan pemilihan informan berdasarkan latar belakang keterkaitan informan dengan pengembangan desa wisata di Desa Timusu. Informan dalam penelitian terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah pemerintah yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Soppeng, Kecamatan Liriaja, Desa Timusu yang berjumlah enam orang. Kelompok informan kedua adalah masyarakat warga Desa Timusu, pengusaha yang berada di wilayah wisata dan pengunjung wisatawan yang datang di lokasi wisata yang berjumlah enam orang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan metode analisis interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992). Metode analisis data Miles dan Huberman (1992) melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dimulai dari pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan fokus pada poin-poin penting. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk yang sistematis, seperti tabel atau diagram, untuk mempermudah analisis. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola atau tema yang muncul dari data, dengan dilakukan verifikasi untuk memastikan validitas hasil analisis. Jika perlu, saya dapat membantu memperjelas penerapan metode ini dalam konteks penelitian Anda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Studi

Desa Timusu dikisahkan oleh Tokoh masyarakat desa bahwa dulu di daerah ini selalu terjadi peperangan, kerena penduduk tidak mau lagi berperang dalam Bahasa Bugis TEA MA'MUSU maka mereka mencari tempat untuk mengungsi dan sampailah mereka pada sebuah Goa, mereka kemudian terdiam dalam Goa tersebut sehingga disebut Goa Timusu yang berasal dari kata "La Tea" berarti tidak mau "Ma'Musu artinya berperang yang artinya tidak mau lagi berperang.

Desa Timusu merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Pattojo, dan berdiri pada tahun 1986 dengan nama yaitu Desa Timusu yang diambil dari legenda desa. Pusat pemerintahan terletak di Kampung Tengepadange Dusun Timusu. Jumlah penduduk yang ada di Desa Timusu berjumlah 3.978 jiwa dimana laki-laki berjumlah 1.875 sedangkan perempuan 2.103 jiwa.

Desa Timusu memiliki potensi sumber daya alam yang besar yaitu material batu kali, material batu gunung, lahan persawahan, lahan perkebunan, lahan hutan, sumber mata air, sungai, embung dan gua.

Desa Timusu meraih predikat sebagai desa wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), wisata alamnya yaitu Permandian Air Panas Bucello dan Pemancingan Cekdam. Selain wisata alamnya masih banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan di Desa Timusu seperti Gua Kadeppe yang jika dikembangkan akan menjadi destinasi wisata terbaru nuansa alam. Selanjutnya di Desa Timusu juga terkenal akan kulinernya yaitu Bebek Palekko Timusu, Sarabba Instan dan Dodol Pangi.

Tipologi Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata sangat tergantung pada dukungan warga desa sendiri yang merupakan partisipasi masyarakat dalam program pengembang desa wisata di Desa Timusu Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Peneliti menggunakan konsep tipologi partisipasi yang dikemukakan oleh Cevat Tosun (1999).

Peneliti kemudian menjelaskan tipologi partisipasi warga dalam pengembangan desa wisata di Desa Timusu berdasarkan data yang dikumpulkan sebagai berikut.

Partisipasi Spontan

Partisipasi ini bersifat spontan atau sukarela, muncul dari bawah tanpa dukungan eksternal. Partisipasi ini merupakan bentuk ideal, karena mencerminkan kegiatan yang bersifat sukarela dan alamiah dari masyarakat dalam mengatasi masalah mereka tanpa bantuan pemerintah atau lembaga eksternal lainnya. Bersifat *bottom up* dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Partisipasi *bottom up* yang dimaksud disini partisipasi yang dari masyarakat atas inisiasi dan inisiatif sendiri, tidak dipaksakan dan alamiah dari masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan informan J selaku Sekretaris Desa Timusu, mengatakan bahwa:

“Kehadiran masyarakat sangat kami perlukan dan sangat membantu dalam proses pembangunan yang ada di Desa. bentuk partisipasi dari masyarakat biasanya membantu dengan tenaga. Rasa kekeluargaan serta budaya gotong-royong yang melatarbelakangi masyarakat ingin berpartisipasi.”(Wawancara, 08 Maret 2024)

Terkait dengan rencana pengembangan desa wisata ini, inisiasi lebih banyak dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan elit. Hal ini diungkapkan oleh informan H yang merupakan bagian dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Timusu yang menyatakan bahwa:

“Selama pengembangan desa wisata, kegiatan yang dilakukan tidak pernah mendapat inisiasi dari masyarakat desa, kami Pokdarwis membuat kegiatan dengan sesama anggota lainnya dan masyarakat tidak terlibat di dalamnya. Kami tidak pernah mengadakan rapat bersama warga setempat” (Wawancara, 11 Maret 2024)

Lebih lanjut informan SA yang merupakan warga desa menjelaskan bahwa:

“Pemerintah desa pernah mengundang saya dan suami saya untuk menghadiri rapat mengenai desa wisata tetapi saya tidak datang” (Wawancara 10 Maret 2024).

Berdasarkan data informan, peneliti berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengembangan desa wisata tidak berada pada partisipasi spontan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak diundang dalam rapat walaupun ada beberapa yang diundang tetapi masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk menghadiri rapat.

Dalam Program pengembangan desa wisata tentunya tidak hanya keterlibatan masyarakat desa yang diperlukan, tetapi keterlibatan dari pengusaha dan pengunjung untuk memberikan feedback untuk memajukan desa wisata ini. Sedangkan untuk keterlibatan pengusaha, pemerintah desa telah memberikan dukungan penuh untuk mewakili Desa Timusu dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan mengenai desa wisata.

Partisipasi Dorongan

Partisipasi ini mengarah pada formal, top down and passive participation, dimana suara dari masyarakat lokal didorong dan terdengar, akan tetapi tidak didukung oleh kekuatan untuk memastikan bahwa suara masyarakat tersebut terdengar oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Tipe ini banyak digunakan di negara berkembang, dimana masyarakat lokal mendukung keputusan dari pembangunan pariwisata yang dibuat oleh penguasa.

Partisipasi ini memungkinkan masyarakat lokal. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan berbagi benefit dari pariwisata, tetapi masyarakat tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu masyarakat memerlukan dorongan dari pemerintah dimana pemerintah membuat program atau kegiatan dan melibatkan masyarakat dalam proses implementasinya atau sering disebut partisipasi Top-Down. Pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan program atau kegiatan mengenai desa wisata seperti pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Workshop dan Pameran Ekonomi Kreatif *Pariwisata (Wekraft)*. Program ini merupakan bagian dari Program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Informan A yang juga Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, mengatakan bahwa:

“Upaya yang DISPARPORA lakukan untuk pengembangan desa wisata yaitu dengan menyuruh Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Wisata untuk membuat protap untuk melakukan penilaian ulang serta membentuk POKDARWIS. Kegiatan selanjutnya yang ingin kami lakukan dan realisasikan yaitu mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa, POKDARWIS dan BUMDes. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa sehingga bisa membangun desanya. Tidak hanya itu kegiatan yang terkait dengan kontribusi pembangunan Desa Wisata yaitu WEKRAF.” (Wawancara,07 Maret 2024).

Lebih lanjut Informan AI yang juga warga desa menjelaskan bahwa:

“Yang saya ketahui pemerintah desa membentuk Pokdarwis, selebihnya saya kurang tau karena saya tidak dilibatkan dalam rapat serta dalam proses implementasi program pengembangan desa wisata ini, tetapi saya mendukung setiap kegiatan yang menyangkut pembangunan desa karena siapa sih masyarakat desa yang tidak mau desa lebih maju”. (Wawancara, 10 Maret 2024)

Berdasarkan data informan dan hasil observasi lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa partisipasi pengembangan desa wisata di Desa Timusu lebih dominan pada tipe partisipasi top-down dimana keterlibatan dari masyarakat dipengaruhi oleh dorongan dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Masyarakat yang terlibat hanya perwakilan, tetapi masyarakat yang tidak terlibat mendukung program atau kegiatan pemerintah menyangkut dengan desa wisata.

Partisipasi Paksaan

Sebuah kondisi dimana partisipasi masyarakat itu dipaksa dan kurang dalam hal public support. Bersifat manipulasi dan dibuat-buat sebagai pengganti partisipasi yang tulus. Motifnya bukanlah memungkinkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan pariwisata, tetapi memungkinkan merekahnya mempunyai kekuasaan untuk mendidik masyarakat lokal sehingga dapat menghindari ancaman potensial terhadap pembangunan pariwisata. Meskipun beberapa keputusan mungkin diambil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tuan rumah dengan berkonsultasi dengan pemimpin lokal, motif sebenarnya ialah mengurangi potensi resiko sosial-politik dalam pengembangan pariwisata.

Berdasarkan data dari hasil wawancara Informan A yang juga Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng, menjelaskan bahwa:

“Kami tidak memiliki kegiatan wajib yang dilaksanakan pemerintah desa, kami memberikan kewenangan pemerintah desa untuk berinovasi dan berkreatifitas untuk membangun desanya, selanjutnya kami sering mengadakan pertemuan antara Pokdarwis, dalam pertemuan tersebut para Pokdarwis akan menyampaikan ide atau gagasannya mengenai desa wisata.” (Wawancara, 07 Maret 2024)

Lebih lanjut Informan IR yang juga warga desa berpendapat bahwa:

“Pemerintah desa tidak pernah memaksa kami dalam ikut berpartisipasi dan saya juga sebagai masyarakat desa tidak pernah menolak program mengenai desa wisata. Desa wisata menurut saya akan menumbuhkan perekonomian desa sehingga saya harap pemerintah desa mengelolanya dengan baik karena kami sepenuhnya mendukung desa wisata ini.” (Wawancara, 10 Maret 2024)

Dengan demikian, peneliti berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat pada program pengembangan desa wisata tidak pada berada di partisipasi koersif, karena masyarakat tidak pernah dipaksa dalam berpartisipasi di program atau kegiatan pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Seperti saat kegiatan Pokdarwis dalam membersihkan tempat wisata maupun program pemerintah daerah yaitu Wekraf tidak memaksa untuk terlibat di dalamnya. dan masyarakat juga tidak menolak adanya

pengembangan desa wisata. Sehingga resiko sosial politik ketika pembangunan desa wisata ini tidak ada malah sebaliknya masyarakat mendukung penuh pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tipologi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program desa wisata di Desa Timusu berada pada tiga kategori tipologi yang dijelaskan oleh Tosun (1999): partisipasi spontan, partisipasi dorongan, dan partisipasi paksaan. Sebagian besar masyarakat terlibat dalam partisipasi dorongan, yang menunjukkan adanya dorongan dari pemerintah untuk berpartisipasi, namun kurangnya inisiatif atau kesukarelaan dari masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, partisipasi yang terlibat masih terbatas, dan ada tantangan dalam mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi tanpa adanya dorongan eksternal.

Berdasarkan tipologi yang ada, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dorongan dari pemerintah, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjang dari pariwisata berbasis desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program desa wisata di Desa Timusu, penting untuk merancang strategi yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat terlibat lebih aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, beberapa keterbatasan perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada Desa Timusu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke desa wisata lainnya di Sulawesi Selatan atau Indonesia pada umumnya. Kedua, pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas informan atau bias peneliti dalam menginterpretasikan data. Ketiga, penelitian ini tidak sepenuhnya mengkaji faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi partisipasi masyarakat, seperti kebijakan pemerintah daerah yang lebih luas atau perubahan sosial-ekonomi yang dapat memengaruhi keterlibatan masyarakat.

Penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk memperluas cakupan geografis dengan membandingkan Desa Timusu dengan desa wisata lain yang memiliki karakteristik berbeda. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di berbagai konteks. Selain itu, penelitian lanjutan juga bisa menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kesadaran lingkungan, atau faktor ekonomi yang dapat memotivasi atau menghambat partisipasi.

Diperlukan juga penelitian yang lebih mendalam tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong partisipasi sukarela (spontan) dan mengurangi ketergantungan pada dorongan eksternal. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan keberlanjutan pengembangan desa wisata di Indonesia.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (1st ed)*. Makassar: CV. SyakirMedia Press
- Bihambing, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Garis Khatulistiwa.
- BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. (2023). <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-soppeng/>. Diakses 6 November 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. (2023). <https://soppengkab.bps.go.id/publikasi.html>. [Diakses 25 November 2023](#)
- Cohen. J & Uphoff, N (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*. *World Development*, 8. 213-235
- Darmanto, Darmanto, Kristanti, Dwi , Aisyah, Siti , & Wahyudi, Heri . (2024). Public Participation And Tourism Marketing In The Development of Tourism Villages In Bengkulu Province. *Journal of Governance*, 9(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.24031>
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi & Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan (1st ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Deviyanti, D. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan BalikpapanTengah*. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380–394.
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Soppeng: Disparpora.
- Desa Timusu. (2023). <https://timusu.desa.id/tentang-desa/>. Diakses 6 November 2023.
- Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Soppeng (2023). <https://visit.soppeng>. Diakses 6 November 2023.
- DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=18>. Diakses 17 Maret 2024
- Dewi, Oktaviani. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajenne Dan Kepulauan Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Efendi, N. A. (2023). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Mangrove Luppung Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makassar, Universitas Hasanuddin.

Development Policy and Management Review (DPMR).

Aulia, S. A. D. R. A. et al. Tipologi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Wisata.

- Fitri, Z. A. K., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2023). Development of a Tourism Village Efforts to Empower the Community's Economy from an Islamic Economic Perspective: A Case Study of West Lombok's Kebon Ayu. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), 115. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).115-123](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).115-123)
- Frasawi, S., & Citra, I. P. A. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada*. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6 (3), 175-188.
- Gede, I., Gede, P., Putri, D., & Putu Nuniek Hutnaleontina. (2024). The role of government and community participation in realizing sustainable tourism development in Tihingan Village, Bali, Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(8), 4621–4621. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.4621>
- Ghaderi, Z., Michael Hall, M. C., & Ryan, C. (2022). Overtourism, residents and Iranian rural villages: Voices from a developing country. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 37(3), 100487. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100487>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik* (1st ed.). Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ife, Jim. (2008). *Community Development*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ibrahim, Y. A. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa Di Kabupaten Takalar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2021). *Pedoman Desa Wisata* (2nd ed.). Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020). *Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021). *Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata untuk Membangkitkan Perekonomian Bangsa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
- Latif, A., Irwan., & Mustanir, A. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan*. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5(2), 144-164.
- Liu, N., Yue, K., & Zhang, X. (2023). Ignored Opinions: Villager-Satisfaction-Based Evaluation Method of Tourism Village Development—A Case Study of Two Villages in China. *Sustainability*, 15(22), 15726–15726. <https://doi.org/10.3390/su152215726>

- Mulyan, Andi, & Martoni, Alfian . (2024). Community Participation in Village Tourism Development. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(3), 120–120. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i3.5559>
- Mardiyanta, A. (2013). *State of The Art: Konsep Partisipasi dalam Ilmu Administrasi*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 26 (4), 227-242.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustikasari. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nugroho, A. A. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Bandung: CV. Harfa Creative.
- Notoadmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pemerintah Republik Indonesia (2009) Undang-Undang No.10 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Pemerintah Kabupaten Soppeng (2019) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 2 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata
- Pemerintah Desa Timusu (2019) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Timusu Tahun 2018-2024.
- Pemerintah Kabupaten Soppeng (2019) Peraturan Bupati Soppeng No. 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Riskayana, Adys, A. K., & Taufik, A. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto*. *Otoritas*. 2(2). 180-190.
- Rakhmawati, Adiyatma, & Wijaya, A. (2024). Building Community Participation in the Development of Warloka Pesisir Village as a Modern Fishing Village in West Manggarai. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 10(3), 404–420. <https://doi.org/10.29408/jhm.v10i3.27062>
- Riady, Iwan, Sirojuzilam, Purwoko, Agus, Lubis, S. N., & Charloq. (2024). Development Model of Sustainable Agrotourism-Based Village Tourism for Improving Community Welfare in Tapanuli Utara Regency, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 1309–1324. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4291>
- Rincon, H., & Rahmi, Dwita . (2002). Preservation of Cultural and Historic Heritage as a Tool for Sustainable Development. *The Geojournal Library*, 4(1), 295–320. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2170-7_15

Development Policy and Management Review (DPMR).

Aulia, S. A. D. R. A. et al. *Tipologi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Wisata.*

- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: KBM Indonesia
- Santoso A dan Heroepoetri A. (2005). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum Dan Demokrasi)*. Bandung: PT. Alumni.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (1sed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitepu, A. (2012). *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistiyowati, Desy, Rahayu, Sri, & Permatasari, S. Jatu. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Katarsis*, 1(3), 38–47. <https://doi.org/10.62734/kts.v1i3.282>
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng No. 44 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Soppeng.
- Tim KKN – PPM UGM Buaya (2021). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*. Yogyakarta: Universitas Gadja Mada.
- Tosun, Cevat. (1999). *Towards a Typology of Community Participation in the Tourism Development Process*. Bilkent University, Ankara/Turkey
- Tawai, A., & Yusuf, Muh. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* (1st ed.). Kendari: Literacy Institute.
- Wardani, N. A. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)*. Skripsi. Fakultas Teknik. Semarang, Universitas Semarang.
- Widayuni, R. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lampung, Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Wardiyanto dan Baiquni, (2011), *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*, Lubuk Agung, Bandung
- Yaniza, Tiza, Marzuki, Ismail, & Savitria, Tia. (2024). Optimizing the Role of Tourism Villages in Community Economic Development. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(2), 17–25. <https://doi.org/10.62951/ijlcv1i2.44>
- Yulis, S. F. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E- KTP) Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi. Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.